

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2016**



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2016

**Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Ir. Nazalyus, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590824 198603 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), yang memuat informasi penting dan relevan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah kepada masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan 2017 secara bertahap bermaksud untuk **mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan**, hal tersebut sesuai dengan visi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 sampai dengan 2017 .

Guna mewujudkan visi (cita-cita) dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
- Misi 2 : Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan
- Misi 3 : Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam
- Misi 4 : Meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan
- Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Misi 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional .

Misi 1 ini diuraikan dengan satu sasaran :

Peningkatan kemampuan/kapasitas para penyelenggara pembangunan kehutanan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Misi 2. Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan

Misi 2 diuraikan dengan tiga sasaran :

Sasaran 1. Terselenggaranya penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Sasaran 2. Terbentuknya wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit – unit (terkecil) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit terkecil yang dimaksud adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik pada hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi.

Sasaran 3. Tersediaanya data dan informasi potensi sumber daya hutan lingkup Provinsi.

Misi 3. Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam.

Misi 3 diuraikan dengan dua sasaran :

Sasaran 1. Terselenggaranya upaya – upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal serta terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan.

Sasaran 2. Berkumpulnya data potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang potensial dikembangkan untuk mendukung pariwisata sektor kehutanan dan terjalinnnya kerjasama usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan.

Misi 4. Meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan.

Misi 4 ini diuraikan dengan dua sasaran :

Sasaran 1. Terlaksananya kegiatan reboisasi (di dalam kawasan hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan).

Sasaran 2. Termonitornya reklamasi lahan bekas tambang dalam kawasan hutan.

Misi 5. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Misi 5 ini diuraikan dengan tiga sasaran :

Sasaran 1. Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang perizinan usaha pada hutan produksi dan hutan lindung baik hutan alam maupun hutan tanaman lintas Kabupaten/Kota.

Sasaran 2. Optimalnya pendapatan negara bukan pajak dan terciptanya tertib administrasi peredaran hasil hutan melalui pengumpulan data potensi dan pilihan pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu.

Sasaran 3. Terlaksananya pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Mengacu pada misi dimaksud, maka terdapat beberapa prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 yaitu :

- a. Tersosialisasinya pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- b. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- c. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- d. Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan;
- e. Terpromosinya / dikenalnya produk-produk unggul dari kehutanan;
- f. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan;

- g. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan;
- h. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat;
- i. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- j. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal;
- k. Berkembangnya konservasi sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan serta wisata alam berbasis masyarakat;
- l. Pengembangan perhutanan sosial;
- m. Terjaminnya kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal;
- n. Terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan terlaksananya operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- o. Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan Kawasan Hutan (KH);
- p. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi;
- q. Terwujudnya penggunaan Kawasan Hutan (KH) sesuai fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku;
- r. Teroperasinya peralatan GIS untuk penyediaan data dan peta kehutanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- s. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini;
- t. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kehutanan dalam hal pengelolaan data peta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 5 (lima) program utama dengan 35 (Tiga Puluh Lima) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 18.949.279.071,-. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 11 sasaran, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian **Sasaran – 1** yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang profesional.

Untuk pencapaian **Sasaran – 2** yaitu terselenggaranya penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Pencapaian **Sasaran – 3** yaitu terbentuknya wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit – unit (terkecil) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit terkecil yang dimaksud adalah

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik pada hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi.

Pencapaian **Sasaran - 4** yaitu Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya hutan lingkup Provinsi.

Pencapaian **Sasaran - 5** yaitu terselenggaranya upaya - upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal serta terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan.

Pencapaian **Sasaran - 6** yaitu terkumpulnya data potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang potensial dikembangkan untuk mendukung pariwisata sektor kehutanan dan terjalinnya kerjasama usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan.

Pencapaian **Sasaran - 7** yaitu terlaksananya kegiatan reboisasi (di dalam kawasan hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan).

Pencapaian **Sasaran - 8** yaitu termonitornya reklamasi lahan bekas tambang dalam kawasan hutan.

Pencapaian **Sasaran - 9** yaitu Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang perizinan usaha pada hutan produksi dan hutan lindung baik hutan alam maupun hutan tanaman lintas kabupaten/kota.

Pencapaian **Sasaran - 10** yaitu optimalnya pendapatan negara bukan pajak dan terciptanya tertib administrasi peredaran hasil hutan melalui pengumpulan data potensi dan pilihan pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu.

Pencapaian **Sasaran - 11** yaitu terlaksananya pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain : masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan, utamanya dalam hal penggunaan lahan hutan secara liar tanpa perijinan yang dijadikan tambang timah inkonvensional oleh masyarakat awam maupun pihak swasta. Karena minimnya kesadaran masyarakat tentangantisipasi dampak dari penggunaan lahan hutan secara liar tersebut, sehingga penebangan hutan dilakukan tanpa ada perijinan dari pihak-pihak yang terkait.

Adapun langkah - langkah untuk mengatasi masalah dimaksud, diantaranya adalah melakukan penyuluhan sistem penanaman kembali (Reboisasi) untuk rehabilitasi hutan dan lahan pasca tambang, penyuluhan tentang penggunaan kawasan hutan (KH) sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku, penyuluhan tentang pengelolaan sumber daya hutan, penyuluhan tentang pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung. Pemberian bibit tanaman pohon untuk perubahan iklim dan bimbingan teknis penanaman secara organik untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Ikhtisar Eksekutif..... | ii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum..... | 1 |
| 1.3. Gambaran Umum Organisasi..... | 2 |
| 1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan..... | 2 |
| 1.3.2. Sumber Daya Manusia dan Asset Dinas Kehutanan..... | 5 |
| 1.3.3. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja..... | 8 |
| 2.1. Visi dan Misi..... | 9 |
| 2.1.1. Visi..... | 9 |
| 2.1.2. Misi..... | 10 |
| 2.2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan..... | 10 |
| 2.2.1. Tujuan..... | 11 |
| 2.2.2. Sasaran..... | 12 |
| 2.2.3. Kebijakan Pembangunan..... | 15 |
| 2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2016..... | 17 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja 2016..... | 33 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016..... | 35 |
| 3.1. pengukuran Pencapaian Sasaran..... | 35 |
| 3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja..... | 41 |
| 3.3. Akuntabilitas Keuangan..... | 54 |
| Bab IV Penutup..... | 56 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Dasar Kebijakan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya. Peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom.

Dalam pelayanan di bidang Kehutanan berdasarkan Peraturan Perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing SKPD antara lain dirinci berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan

memprediksi keadaan yang akan dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong bagi terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan, sedangkan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah Provinsi sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pembagian Urusan

Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Peraturan tersebut urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dinas yang termasuk dalam urusan pilihan tersebut.

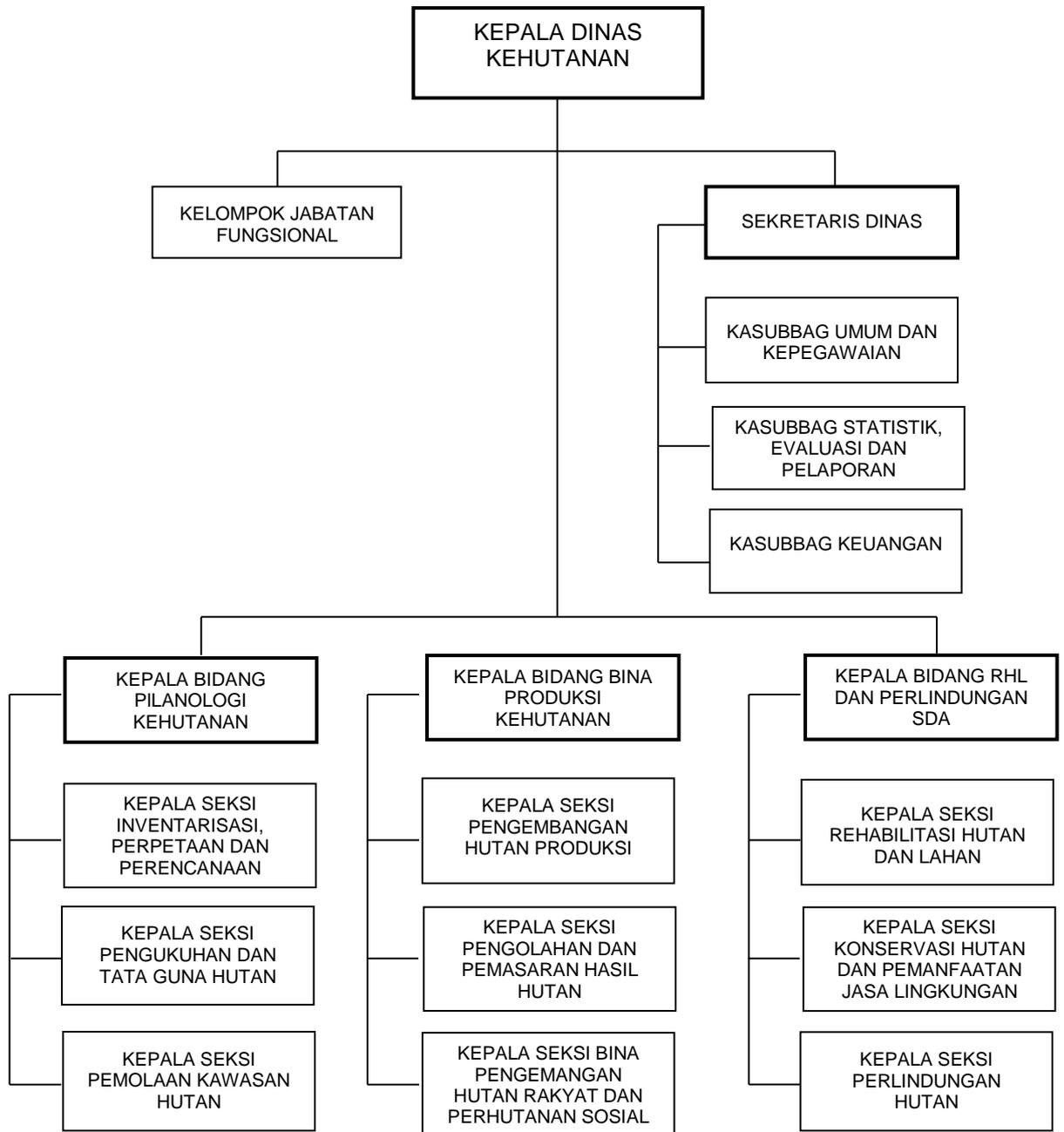
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membidangi pengelolaan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan berbagai permasalahan dan penyelesaiannya.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

- a. 1 (satu) Kepala Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIa;
- b. Sekretaris, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Statistik, Evaluasi dan Pelaporan

- c. Kepala Bidang Planologi Kehutanan, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
- Seksi Inventarisasi, Perpetaan dan Perencanaan
 - Seksi Pengukuhan dan Tata Guna Hutan
 - Seksi Pemolaan Kawasan Hutan
- d. Kepala Bidang Produksi Kehutanan, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
- Seksi Pengembangan Hutan Produksi
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
 - Seksi Bina Pengembangan Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial
- e. Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perlindungan Sumber Daya Alam, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
- Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
 - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Seksi Perlindungan Hutan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dibawah ini adalah struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :



1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Aset SKPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 76 pegawai, dengan status kepegawaian 54 PNS, 12 orang tenaga honorer dan 10 orang tenaga honorer Pengaman Hutan. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 11 orang. Sedangkan honorer terdiri dari S1 sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 18 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 12 orang.

Tabel 1.3.2.1

Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | | Jumlah |
|-----|--------------------|----------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Doktoral/ S3 | - | - | - |
| 2 | Pasca Sarjana/ S2 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Sarjana / S1 | 21 | 12 | 33 |
| 4 | Diploma-IV | - | - | - |
| 5 | Diploma-III | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Diploma-I/ II | - | - | - |
| 7 | SLTA | 7 | 6 | 13 |
| 8 | SLTP | - | - | - |
| 9 | SD | - | - | - |

Tabel 1.3.2.2

Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eseloning

| No | Tingkat Eselon | Jumlah Pegawai | | Jumlah |
|----|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | II A | 1 | - | 1 |
| | II B | - | - | - |
| | II C | - | - | - |
| | II D | - | - | - |
| 2 | III A | 3 | 1 | 4 |
| | III B | - | - | - |
| | III C | - | - | - |
| | III D | - | - | - |
| 3 | IV A | 7 | 5 | 12 |
| | IV B | - | - | - |
| | IV C | - | - | - |
| 4 | Non Eselon | 21 | 15 | 35 |
| 5 | Fungsional | 6 | 1 | 8 |
| | Jumlah | 38 | 22 | 60 |

Dilihat dari tabel diatas bahwa pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlihat beragam dari segi golongan maupun pendidikan.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum Penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Dasar Hukum

Memuat tentang Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, PermenPANRB yang mengatur tentang kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan LAKIP SKPD.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Memuat gambaran umum organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyangkut tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II RENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi SKPD

Uraian visi dan misi yang akan dicapai oleh SKPD dalam 5 tahun ke depan, sebagaimana termuat dalam rencana strategis SKPD.

Visi : kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir tahun perencanaan.

Misi : cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

Tujuan : uraian operasional dari misi

Sasaran : uraian terukur dari tujuan

Kebijakan : upaya (melalui pelaksanaan program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2.3 Rencana Kinerja SKPD

Memuat uraian yang menjelaskan korelasi antara pencapaian target sasaran strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Uraian ini berpijak dari tabel penetapan kinerja.

3.1 Pengukuran Kinerja

Memuat uraian yang menjelaskan tabel pengukuran kinerja tahunan, sekaligus mengkorelasikannya dengan tabel pengukuran program/kegiatan.

3.2 Analisis Kinerja

Memuat uraian yang menjelaskan tentang keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam melaksanakan misi.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

- a. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi;
- c. Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku;
- d. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat;
- e. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal;
- g. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan;

- h. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan;
- i. Terlaksananya upaya reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan;
- j. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan HHBK;
- k. Terpromosinya produk – produk unggul dari kehutanan;
- l. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTI, HTR dan meningkatnya tertib administrasi peredaran dan iuran hasil hutan
- m. Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan (meningkatnya PNBK);
- n. Tersosialisasinya pengelolaan KPMP;
- o. Terbangunnya hutan adat.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan lestari, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis pada pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2016 telah menetapkan 5 program utama dengan 35 kegiatan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2017 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2012 s.d tahun 2017.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

2.1. Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan”***.

Dengan mengacu pada Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Visi sebagai berikut : ***“Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”***.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Perwujudan kondisi pembangunan kehutanan lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemantapan, perlindungan dan pembinaan produksi pada kawasan hutan beserta sumberdaya alam yang dikandungnya serta sumber daya manusia penyelenggara pembangunan kehutanan di daerah yang profesional dan mampu bersama-sama dengan masyarakat dan para pihak untuk memberikan manfaat baik secara ekonomis, sosiologis maupun ekologis bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi-misi, dimana misi-misi tersebut secara umum merupakan tanggungjawab seluruh pihak/stakeholders.

2.1.2 Misi

Guna mewujudkan visi (cita-cita) dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Misi 2 : Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan.
- Misi 3 : Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam.
- Misi 4 : Meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan.
- Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi, penyelesaian permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, tujuan disusun untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang profesional;
2. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan atas status, letak batas dan luas kawasan hutan;
3. Mewujudkan operasionalisasi kelembagaan KPH yang berkelanjutan;
4. Menciptakan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dalam rangka mendukung pemantapan kawasan hutan;

5. Meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan data dan informasi SDH yang akurat dan terkini;
6. Meningkatkan pelayanan publik dalam hal pengecekan kawasan hutan di lapangan dengan lebih efektif dan efisien;
7. Mewujudkan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku;
8. Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan;
9. Mengembangkan upaya konservasi hutan, SDA dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam;
10. Penurunan luas lahan kritis dan peningkatan daya dukung DAS;
11. Meningkatkan pemberdayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
12. Mempromosikan berbagai produk unggul dari kehutanan;
13. Meningkatkan pengembangan kawasan hutan produksi melalui pembangunan HTR dan HTI;
14. Meningkatkan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan;
15. Meningkatkan pengelolaan KPHP;
16. Pembangunan hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial.

2.2.2. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu dan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya kawasan hutan sehingga pengelolaan SDH dapat dilaksanakan secara optimal, dengan indikator sebagai berikut :
 - Orientasi batas kawasan hutan sebesar 10 % dari total panjang batas kawasan hutan
 - Rekonstruksi batas kawasan hutan sebesar 10 % dari total panjang batas kawasan hutan

- Penetapan batas partisipatif pada areal pemanfaatan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat (HR)
2. Terbentuknya kelembagaan KPH dan terlaksananya operasionalisasi KPH, dengan indikator sebagai berikut :
 - Pembentukan kelembagaan untuk 6 KPHP
 - Operasionalisasi 6 KPHP
 3. Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan kawasan hutan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Data terkini pengukuhan dan kondisi batas kawasan
 - Perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Provinsi
 - Penataan batasan kawasan hutan
 - Penunjukan kawasan hutan berikut petanya
 - Koordinasi dan perencanaan dalam rangka pemanfaatan RTRW
 4. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini, dengan indikator sebagai berikut:
 - Data dan informasi geospasial dan tematik kehutanan terkini tingkat provinsi
 - Data dan informasi sumber daya hutan pada kawasan hutan tingkat provinsi
 - Data dan informasi statistik kehutanan provinsi
 - Identifikasi perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan
 5. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi, dengan indikator :
 - Teroperasinya peralatan GIS untuk penyediaan data dan peta kehutanan
 6. Terwujudnya penggunaan KH sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku, dengan indikator sebagai berikut:

- Rekomendasi ijin pinjam pakai KH terlayani 100% secara tepat waktu
 - Monev penggunaan KH
 - Data dan informasi penggunaan KH
7. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - Penanganan tindak pidana kehutanan; kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan meningkat
 8. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Kasus kebakaran hutan dan lahan terkendali
 9. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal, dengan indikator sebagai berikut:
 - Terkelolanya kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung
 - Database flora dan fauna, habitatnya serta peningkatan kegiatan konservasi, jasa lingkungan dan wisata alam
 10. Mendukung terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dengan indikator sebagai berikut :
 - Luas lahan kritis menurun sebanyak 10% dari data awal 112.000 hektar
 11. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Pemulihan daya dukung DAS & peningkatan produktivitas lahan
 12. Mendukung terlaksananya upaya reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan, dengan indikator:
 - Realisasi reklamasi dalam kawasan hutan meningkat

13. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan HHBK, dengan indikator sebagai berikut:
 - Masyarakat terlatih dalam pemanfaatan HHBK
14. Terpromosinya/ dikenalnya produk-produk unggul dari kehutanan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Dikenalnya produk-produk unggulan hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Prov. Kep. Bangka Belitung
15. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTR dan HTI, dengan indikator sebagai berikut:
 - Terkendalinya pembangunan HTR dan HTI
16. Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Meningkatnya PNB
17. Tersosialisasinya pengelolaan KPHP, dengan indikator sebagai berikut:
 - Terkendalinya pengelolaan KPHP
18. Terbangunnya hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta peningkatan usaha kehutanan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Bertambahnya luas hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta tumbuh dan berkembangnya perekonomian.

2.2.3 Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan melalui program dan kegiatan yang berkesinambungan.

Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - a. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
 - b. Pengembangan hutan tanaman
 - c. Pengembangan hasil hutan non kayu

- d. Optimalisasi PNBP
 - e. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- a. Pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
 - b. Peringatan Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional
 - c. Pembangunan dan Pengelolaan sumber benih tanaman hutan
 - d. Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
 - e. Dukungan penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu
 - f. Fasilitasi forum DAS
 - g. Fasilitasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah
 - h. Monev pelaksanaan reklamasi bekas tambang
 - i. Dukungan penilaian reklamasi bekas tambang
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- a. Kegiatan Patroli dan pengamanan hutan
 - b. Perlindungan dan pengamanan hutan bersama masyarakat
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan dan lingkungan
 - d. Sosialisasi pencegahan dan tampak kebakaran hutan dan lahan
 - e. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - f. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - g. Dukungan kajian penetapan bentuk kawasan hutan konservasi
 - h. Penyusunan data base kawasan HL dan HK
 - i. Dukungan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
 - j. Dukungan penyusunan rencana pengelolaan HK dan HL sesuai bentuk kelola
 - k. Penyusunan data dan informasi flora dan fauna tertentu beserta habitatnya
 - l. Pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam (flora/fauna/kawasan), jasa lingkungan dan wisata alam

4. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
 - a. Pengembangan hutan masyarakat adat
 - b. Pendampingan kelompok usaha perhutanan
5. Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan hutan
 - a. Pengukuhan Kawasan Hutan
 - b. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
 - c. Perencanaan, Pemanfaatan, serta Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - d. Inventarisasi dan Pemantauan SDH
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional SIG/GIS
 - f. Penyusunan basis data realisasi ijin pinjam pakai KH provinsi
 - g. Pelatihan GIS bagi aparatur kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2016

Dalam rencana kinerja tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja program dan kegiatan.

| Sasaran | | | Program | Kegiatan | | | | Keterangan |
|---|--|--------|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Uraian | Indikator Kinerja | Target | | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Terlaksana promosi produk – produk unggul dari kehutanan | Tercapainya peningkatan promosi produk – produk unggulan hasil kayu dan bukan kayu | 14,28% | Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan | Input : - Dana Output : - Promosi produk HHK dan HHBK Outcome : - Meningkatkan pemasaran hasil hutan | Rp. (jt) kab % | 400.000 6 20 | |
| Terkendalinya pemangunan HTI dan HTR Prov. Kep. Bangka Belitung | Tercapainya peningkatan pemanfaatan hutan dan tertibnya peredaran hasil hutan | 14,28% | | Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Peredaran Hasil Hutan | Input : - Dana Output : - Sosialisasi pembinaan HTR, HTI dan Peredaran Hasil Hutan Outcome : - Pemahaman Masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan | Rp. (jt) Orang Orang | 268.500 180 180 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | hutan dan peredaran hasil hutan | | | |
| Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan | Tercapainya penguatan pembangunan HTR dan tercapainya peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan | 14,28% | | Bimtek Teknis dan Penguatan HTR dan Penatausahaan Hasil Hutan | Input : - Dana Output : - Terlatihnya Pendamping HTR dan pemegang IUPHHK-HTR Outcome : - Kualitas petugas dan penatausahaan hasil hutan dan PNPB | Rp. (jt) Orang Orang | 293.250 80 80 | |
| Meningkatnya pemanfaatan HTR | Tercapainya Penguatan Pembangunan HTR | 14,28% | | Observasi lapangan pembangunan HTR | Input : - Dana Output : - Observasi HTR Outcome : - Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dan petugas tentang HTR | Rp. (jt) kali Orang | 148.150 1 20 | |
| Meningkatnya kualitas Pemanfaatan HTR | Tercapainya Peningkatan Pemanfaatan Program HTR | 14.28% | | Pembinaan HTR | Input : - Dana Output : - Terlaksananya program pembinaan HTR ke kelompok pemegang IUPHHK - HTR | Rp. (jt) KTH | 237.375 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|--|
| | | | | | Outcome : - Meningkatnya Pemahaman masyarakat dalam Pemanfaatan hutan melalui program HTR | Orang | 250 | |
| Meningkatnya pemanfaatan Hasil Hutan Kayu | Peningkatan kinerja melalui indentifikasi dan penyelesaian masalah IUPHHK -HTI | 14.28% | | Bedah kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu | Input : - Dana Output : - Teridentifikasi kendala dan masalah pembangunan HTI Outcome : - Meningkatnya Kinerja PHPL IUPHHK - HTI | Rp. (jt) IUPPHHK - HTI IUPPHHK - HTI | 160.000 7 7 | |
| Meningkatnya pemanfaatan Komoditi kehutanan | Berkembangnya komoditi kehutanan melalui hasil hutan non kayu | 1 Prov | | Pengembangan informasi komoditi kehutanan prioritas penyuluh kehutanan dan pelaku usaha melalui potensi sumber daya hutan bangsa belitung | Input : - Dana Output : - Terbentuk suatu komoditi kehutanan bersama prioritas penyuluh kehutanan Outcome : - Meningkatnya komoditi dan koperasi kehutanan dari hasil hutan non kayu | Rp. (jt) Provinsi Provinsi | 99.300 1 1 | |
| Meningkatnya dan pemanfaatan | Pengoperasional isasi kesatuan pemangku | Prov | Program Rehabilitasi Hutan dan | Operasional KPHP dan srana penunjang | Input : - Dana Output : | Rp. (jt) | 1.282.180 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|--|------------------------------------|--|--|
| KPHP | produksi (KPHP) | | Lahan | lainya | - Meningkatnya kualitas pengelolaan KPHP Outcome : - KPHP yang telah terbentuk dan meningkatnya tutupan lahan pada KPHP | Kab. KPHP | Bangka Barat dan Beltim 2 | |
| Tersediaanya dokumen pemanfaatan pengelolaan ekosistem yang baik di Pulau Bangka | Jumlah dokumen pengelolaan pemanfaatan ekosistem mangrove | Prov | | Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan | Input : - Dana Output : - Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Hutan Outcome : - Meningkatnya tutupan lahan pembuatan silvofishery mangrove, rehabilitasi hutan dan lahan di kelompok HKM dan taman Arborentum di kawasan konservasi (tahura) | Rp. (jt) Kab. Hektar | 1.328.000 Beltim dan Bateng 28 | |
| Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan | Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam | 1 Prov | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | Perlindungan dan pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel | Input : - Dana Output : - Berkurangnya pelanggaran tindak pidana kehutanan Outcome : - Penanganan tindak | Rp. (jt) wilayah | 295.150 Prov.Babel | |

| | | | | | pidana kehutanan di Prov.Kep. Babel | 1 | Laporan | |
|--|--|--------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| Terselenggara nya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan | Teridentifikasi dan terfasilitasinya para penangkar tumbuhan dan satwa langka di Prov.Kep. Babel | 1 Prov | | Indentifikasi sebaran Flora dan Fauna Langka (TSL) di Prov.Kep. Bangka Belitung | Input : - Dana Output : - Konservasi (perlindungan flora dan fauna langka) Outcome : - Tersedianya penangkar yang memiliki izin | Rp. (jt) Buku Prov | 296.630 1 1 | |
| Peningkatan pembinaan PAMHUT | Terlaksananya pembinaan dan koordinasi PAMHUT Swakarsa | 1 Prov | | Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov.Kep. Babel | Input : - Dana Output : - Terbangunnya Koordinasi yang baik Outcome : - Terlaksananya fasilitas PAMHUT Swakarsa Kabupaten | Rp. (jt) Kab Kab | 482.260 6 6 | |
| Terselenggara nya usaha perlindungan hutan | Jumlah peserta terlatih dalam pengendalian kebakaran hutan | 6 Kab | | Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang | Input : - Dana Output : - Pertemuan pengendalian kebakaran hutan dan sosiliasi peraturan bidang perlindungan hutan Outcome : | Rp. (jt) Kab | 298.880 6 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | - Terciptanya keamanan kawasan hutan | Kab. | 6 | |
| Terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan | Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam | 1 Prov | | Operasional Polisi Hutan (POLHUT) | Input : - Dana Output : - Terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan Outcome : - Berkurangnya tindak pidana kehutanan sehingga meningkatnya kegiatan perlindungan Hutan | Rp. (jt) Kab Kab | 598.580 6 6 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|--|---|--|---|--|
| Terselenggara nya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestaraan hutan | Terlaksananya keberhasilan PKA Wana Lestari | 1 Prov | | Penilaian Lomba PKA Wana Lestari | Input : - Dana Output : - Tersedianya penilaian lomba PKA Wana Lestari Outcome : Terlaksananya keberhasilan PKA Wana Lestari | Rp. (jt) Peserta Peserta | 114.780 Polhut & kader konservasi Polhut & kader konservasi | |
| Peningkatan hutan dan konservasi sumber daya hutan | Terlaksananya perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam | 6 Kab | | Pembuatan pos jaga dan papan pengumuman di hutan produksi | Input : - Dana Output : - Terlaksananya pembuatan pos jaga dan terpasangnya papan pengumuman Outcome : - Terciptanya keamanan | Rp. (jt) Kab Kab | 289.280 6 6 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Peningkatan perlindungan Konservasi SDA bagi masyarakat | Terbangunnya pendampingan perlindungan dan konservasi SDA bagi masyarakat dan penyuluh kehutanan | 1 Prov | | Pendampingan penyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi | Input : - Dana Output : - Terbangunnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi DAS Outcome : - Tercapainya pengelolaan SDA dan perlindungan hutan bersama penyuluh kehutanan | Rp. (jt) Prov Kab | 78.580 1 6 | | |
| Tersedianya dokumen pemanfaatan pengelolaan ekosistem Mangrove | Teridentifikasi potensi dan sebaran mangrove di Prov.Kep.Babel | Kab. Bangka Barat | | Survei potensi dan sebaran Mangrove di Prov.Kep. Babel | Input : - Dana Output : - Tersusunnya buku laporan Mangrove Outcome : - Terlaksananya konservasi (perlindungan Mangrove) | Rp. (jt) Buku Kab. | 245.810 1 Bangka Barat | | |
| Terlaksananya Operasional GIS | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyediaan data dan informasi batas kawasan hutan | 8.13% | Program perencanaan dan Pengembangan hutan | Operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan | Input : - Dana Output : - Terlaksananya Operasional GIS dan alat operasi pengukuran dan perpetaan Outcome : - Tersedianya peta dan | Rp. (jt) Wilayah | 189.050 Prov. Kep. Babel | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | Informasi kawasan hutan | wilayah | Prov. Kep. Babel | | |
| Terlaksananya Operasional GIS | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyediaan data dan informasi batas kawasan hutan | 8.13% | Program perencanaan dan Pengembangan hutan | Operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan | Input : - Dana Output : - Terlaksananya Operasional GIS dan alat operasi pengukuran dan perpetaan Outcome : - Tersedianya peta dan Informasi kawasan hutan | Rp. (jt) Wilayah wilayah | 189.050 Prov. Kep. Babel Prov. Kep. Babel | | |
| Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan program/kegiatan tahunan Prov.Kep. Babel | Tersusun Dokumen Perencanaan Tahunan | 1 Dinas | | Rapar Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan | Input : - Dana Output : - Dokumen Renja SKPD Outcome : - Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan | Rp. (jt) Prov. Prov. | 122.280 1 1 | | |
| Terselenggara nya upaya penertiban izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan | Tersedianya dukungan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan hutan | 8.30% | | Monitoring dan Evaluasi Penggunaan kawasn hutan | Input : - Dana Output : - Terlaksananya Monev terhadap pemegang IPPKH Outcome : - Terwujudnya | Rp. (jt) Perusahaan IPPKH Buku Laporan | 347.940 6 1 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|---|---|------------------------------------|--|
| hutan Prov. Kep. Bangka Belitung | | | | | pengendalian terhadap pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan | Monev | | |
| Terselenggaranya Rekonsiliasasi pembangunan Kehutanan | Terlaksananya Rekonsiliasasi data dan informasi pembangunan Kehutanan | 100% | | Rekonsiliasasi dan informasi pembangunan kehutanan se-Prov.Kep.Babel | <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya PDB dari bidang kehutanan Sinkronisasi data dan informasi pembangunan Kehutanan <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data base pembangunan kehutanan se - Prov.kep. Babel | <p>Rp. (jt)</p> <p>Kab/kota</p> <p>%</p> | <p>485.780</p> <p>7</p> <p>100</p> | |
| Terselenggaranya Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban bagi IPPKH | Optimalisasi Penggunaan Kawasan Hutan | 8.30% | | Sosialisasi pemenuhan kewajiban bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan | <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksanya Sosialisasi terhadap Pemegang IPPKH dan aparaturnya kehutanan <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemenuhan dalam rangka pengendalian PKH | <p>Rp. (jt)</p> <p>Peserta</p> <p>Peserta</p> | <p>110.600</p> <p>40</p> <p>40</p> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|---|-----------------------------|------------|--|
| Terselenggara nya Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan | Terwujudnya dukungan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak | 8.30% | | Konsultasi publik rencana pengelolaan dan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model | Input : - Dana | Rp. (jt) | 263.900 | |
| | | | | | Output : - Terlaksananya Sosialisasi rencana pengelolaan dan tata hutan kesatuan pengelolaan huta (KPH) model | Peserta | 80 (2 KPH) | |
| | | | | | Outcome : - Tersampainya informasi rencana pengelolaan dan tata hutan KPH | Peserta | 80 (2 KPH) | |
| Terselenggara nya upaya penyediaan informasi sumber daya hutan pada kawasan hutan tingkat Provinsi | Terinventarisasi dan terpantaunya perkembangan pemanfaatan sumber daya Hutan | 8.30% | | Sosialisasi neraca sumber daya hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola Hutan | Input : - Dana | Rp. (jt) | 260.770 | |
| | | | | | Output : - Tersusunnya buku tentang NSDA | Dokumen NSDH/ peserta | 40 | |
| | | | | | Outcome : - Tersedianya dan terinformasinya data sumber daya hutan | Dokumen NSDH/ peserta | 40 | |
| Terselenggara nya pelaksanaan Oreintasi Batas kawasan hutan | Tercapainya Pemantapan Kawasan Hutan | 8.30% | | Pemantapan Kawasan Hutan | Input : - Dana | Rp. (jt) | 206.205 | |
| | | | | | Output : - Terlaksananya kegiatan orientasi dan inventarisasi batas dan terlaksananya sosialisasi IP4T | Km Trayek/ Peserta | 90/40 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | Outcome : - Tersedianya data kondisi batas lapangan kawasan terhadap aspek yang terkait dengan IP4T | Km Trayek/ Orang | 90/40 | |
| Terselenggaranya pembentukan Kelembagaan FGD KPH di Prov. Kep. Babel | Tercapainya pemahaman Perencanaan dan Pengembangan hutan | 8.30% | | Penyiapan penyusunan kelembagaan dan FGD KPH di Prov. Kep. Babel | Input : - Dana Output : - Tercapainya fasilitasi penyusunan kelembagaan KPH di Provinsi Outcome : - Optimalisasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak | Rp. (jt) Dokumen Dokumen | 220.050 Konsep revisi Pergub dan peserta FGD Konsep revisi Pergub dan peserta FGD | |
| Terselenggaranya sinkronisasi RKTP | Terwujudnya Sinkronisasi RKTP dengan RKTN | 8.30% | | Revisi rencana kehutanan tingkat Provinsi | Input : - Dana Output : - Terlaksananya revisi RKTP Outcome : - Dokumen revisi RKTP | Rp. (jt) Dokumen RKTP Dokumen RKTP | 149.975 1 1 | |
| Terselenggaranya koordinasi perencanaan pemantapan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi | Terwujudnya perencanaan pemantapan ruang (substansi kehutanan dalam RTRWP) | 8.30% | | Koordinasi dan perencanaan pemantapan ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi | Input : - Dana Output : - Terlaksananya Koordinasi perencanaan pemantapan ruang (substansi kehutanan RTRWP) | Rp. (jt) Kab (pulau bangka) | 94.950 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | Outcome : - Tersedianya data dan informasi pemanfaatan ruang (substansi kehutanan) | Laporan | 1 | |
| Terselenggara nya upaya Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kehutanan Provinsi Babel | 6 Kab/ko ta | | Monitoring dan Evaluasi pembangunan kehutanan Prov.Kep. Babel | Input : - Dana Output : - Laporan tentang Monev pelaksanaan pembangunan kehutanan Prov.Babel Outcome : - Terwujudnya evaluasi terhadap pembangunan kehutanan Prov.Babel | Rp. (jt) Keg.pemba ngunan kehutanan Prov.Babel Keg.pemba ngunan kehutanan Prov.Babel | 223.740 | |
| Terselenggara nya upaya kemitraan masyarakat di luar kawasan hutan | Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan kemitraan masyarakat di luar kawasan hutan | Prov | | Pengembangan hutan rakyat | Input : - Dana Output : - Meningkatnya kualitas pengelolaan hutan rakyat Outcome : - Meningkatnya kualitas tutupan lahan melalui areal model pengembangan HTR, tanaman sebagai lurus jalan dan taman arboretum di luar | Rp. (jt) Kab Hektar | 543 Belim, Basel, Bateng, Belitung, Bangka dan Babar 22 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
| | | | | | kawasan hutan | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, rencana kinerja tahunan tahun 2016 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disepakati antara kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Daerah Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TA : 2016

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
|--|--|---|--------|------|
| 1. | Menurunnya luas lahan kritis sebanyak 30 % dari data awal 112.000 hektar sampai tahun 2017 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 10 | % |
| 2. | Terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan | Penyelesaian tindak Pidana hutan | 60 | % |
| | | Penanganan kebakaran hutan | 7 | Kab. |
| 3. | Meningkatnya konservasi sumber daya alam | Jumlah satu pengelolaan kawasan hutan konservasi | 7 | Kab. |
| 4. | Meningkatnya pengelolaan hutan produksi lestari | Jumlah KPH yang terbentuk | 6 | KPH |
| | | Luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman : | | |
| | | - Hutan Kemasyarakatan (HK) | 4 | Unit |
| | | - Hutan Desa (HD) | 4 | Unit |
| | | - Hutan Tanaman Rakyat (HTR) | 4 | Unit |
| Penetapan luas IUPHHK-HTI | 25 | % | | |
| Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 5 | % | | |
| 5. | Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan kawasan hutan | Orientasi batas kawasan hutan | 100 | Km |
| | | Rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan | 100 | % |

| | | | | |
|--|--|---|---|---------|
| | | Data dan informasi potensi kehutanan lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | Dokumen |
| | | | | |

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | Rp. 1.466.025.000 |
| 2. | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Rp. 2.537180.000 |
| 3. | Program Perlindungan dan Konservasi Hutan | Rp. 1.476450.000 |
| 4. | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | Rp. 747.610.000 |
| | Jumlah | Rp. 6.227.265.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran;
2. Analisis dan Evaluasi Kinerja;
3. Akuntabilitas Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran capaian sasaran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Hingga akhir tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik dengan menyediakan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Presentase peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan | 5% | 5% | 100 | 100 |
| | Jumlah luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman | 200 Hektar | 200 hektar | 100 | 100 |

Tujuan 2 : Mewujudkan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku | Rekomendasi ijin pinjam kawasan terlayani | 100 % | 100 % | 100 | 100 |
| | Monev penggunaan kawasan hutan | 8.30% | 8.30% | 100 | 100 |

Tujuan 3 : Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran kedua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|---|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat | Penanganan tindak pidana kehutanan, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan meningkat | 60% | 60% | 100 | 100 |
| 2. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Kasus kebakaran hutan dan lahan menurun dan terkendali | 7 Kab | 7 Kab | 100 | 100 |

Tujuan 4 : Mengembangkan upaya konservasi hutan, SDA dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal | 1. Terkelolanya kawasan hutan konservasi dan hutan lindung 2. Database flora dan fauna, habitatnya | 7 Kab 7 Kab | 7 Kab 7 Kab | 100 100 | 100 100 |

Tujuan 5 : Penurunan luas lahan kritis dan peningkatan daya dukung DAS.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ketiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan | 1. Luas lahan kritis menurun sebanyak 30% dari data awal 112.000 hektar 2. Pemulihan DAS dan peningkatan produktivitas lahan | 10% lahan 50% lahan DAS | 10% lahan 50% lahan DAS | 100 100 | 100 100 |

Tujuan 6 : Meningkatkan pemberdayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Meningkatnya pemberdayaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) | 1. Terlaksananya promosi produk – produk hasil hutan 2. dikenalnya produk – produk unggulan hasil hutan kayu dan non kayu | 6 Kab 25% | 6 Kab 25% | 100 100 | 100 100 |

Tujuan 7 : Mempromosikan berbagai produk unggul dari kehutanan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau

kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|--------------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Terpromosinya produk – produk unggul dari kehutanan | 1. Peningkatan pemasaran hasil hutan | 20% | 20% | 100 | 100 |

Tujuan 8 : Meningkatkan pengembangan kawasan hutan produksi melalui pembangunan HTR dan HTI.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTR dan HTI | 1. terlaksananya sosialisasi HTI dan peredaran hasil hutan 2. Peningkatam penggunaan hutan produksi (HTI dan HTR) | 180 Orang 25% | 180 Orang 25% | 100 100 | 100 100 |

Tujuan 9 : Meningkatkan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prose ntase (%) | % capai an tahun sebel umny a |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Meningkatnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan | Meningkatnya pengelolaan PNPB | 5% | 5% | 100 | 100 |

Tujuan 10 : Pembangunan hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prose ntase (%) | % capai an tahun sebel umny a |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Terbangunnya hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta peningkatan usaha kehutanan | Bertambahnya luas hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta tumbuh dan berkembangnya perekonomian | 1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan | 1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan | 100 | 100 |

3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja

a. Sasaran-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| asasan Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prose ntase (%) | % capai an tahun sebel umny a |
|--|--|---------------|------------------|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Presentase peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan | 5% | 5% | 100 | 100 |
| | Jumlah luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman | 200 Hektar | 200 hektar | 100 | 100 |
| Rata – rata capaian sasaran-1 | | | | 100% | 100% |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

b.Sasaran -2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prose ntase (%) | % capai an tahun sebel umny a |
|--|---|---------------|------------------|--------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku | Rekomendasi ijin pinjam kawasan terlayani | 100 % | 100 % | 100 | |
| | Monev penggunaan kawasan hutan | 8.30% | 8.30% | 100 | 100 |
| Rata – rata capaian sasaran-2 | | | | 100% | 100% |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Sasaran-3 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|---|---|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat | Penanganan tindak pidana kehutanan, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan meningkat | 60% | 60% | 100 | 100 |
| 2. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Kasus kebakaran hutan dan lahan menurun dan terkendali | 7 Kab | 7 Kab | 100 | 100 |
| Rata - rata capaian sasaran-3 | | | | 100 % | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

c. Sasaran-4 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|---|--|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 2. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | Kasus kebakaran hutan dan lahan menurun dan terkendali | 20 % | 20 % | 100 | 100 |
| Rata - rata capaian sasaran-4 | | | | 100 % | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-4 diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat petani/kebun terhadap bahaya kebakaran hutan;
2. Terbatasnya sumber daya manusia kehutanan sebagai pemantau hotspot (titik rawan) kebakaran hutan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan;
2. Pelatihan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan;
2. Pelatihan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Pemanfaatan alat dekteksi kebakaran hutan;
4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan.

d. Sasaran 5 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal | 3. Terkelolanya kawasan hutan konservasi dan hutal lindung 4. Database flora dan fauna, habitatnya | 7 Kab 7 Kab | 7 Kab 7 Kab | 100 100 | 100 100 |
| Rata - rata capaian sasaran-5 | | | | 100 % | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 - 2017 sampai pada tahun 2016, pada sasaran-5 telah sesuai dari target yang telah ditetapkan.

e. Sasaran-6 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Meningkatnya pemberdayaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) | 1. Terlaksananya promosi produk - produk hasil hutan 2. dikenalnya produk - produk unggulan hasil hutan kayu dan non kayu | 6 Kab 25% | 6 Kab 25% | 100 100 | 100 100 |
| Rata - rata capaian sasaran-6 | | | | 100 % | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-6 diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan;
2. Maraknya illegal logging dan illegal farming.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bibit tanaman pohon untuk perubahan iklim dan bimtek penanaman secara organik untuk rehabilitasi hutan dan lahan;
2. Melakukan penyuluhan sistem penanaman kembali (reboisasi);
3. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam pohon (One Billion One Tree);
4. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam 1 milyar pohon.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan;
2. Melakukan penyuluhan sistem penanaman kembali (reboisasi);
3. Pemberian bibit tanaman pohon untuk perubahan iklim dan bimtek penanaman secara organik untuk rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam pohon (One Billion One Tree);
5. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam 1 milyar pohon;
6. Melaksanakan pemeliharaan pada pohon yang ditanam;
7. Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2015, pada sasaran-6 telah mencapai 17%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran-6 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

f. Sasaran 7 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|--------------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Terpromosinya produk – produk unggul dari kehutanan | 1. Peningkatan pemasaran hasil hutan | 20% | 20% | 100 | 100 |
| Rata – rata capaian sasaran-7 | | | | 100 % | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-7, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-7 diantaranya adalah :

1. Kurangnya munculnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan;

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
2. Melaksanakan pelatihan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
2. Melaksanakan pelatihan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3. Mendorong peningkatan dan pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2015, pada sasaran-7 telah sesuai dari target yang telah ditetapkan.

g. Sasaran-8 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTR dan HTI | 1. terlaksananya sosialisasi HTI dan peredaran hasil hutan 2. Peningkatam penggunaan hutan produksi (HTI dan HTR) | 180 Orang 25% | 180 Orang 25% | 100 100 | |
| Rata - rata capaian sasaran-8 | | | | 100 % | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-8 diantaranya adalah :

1. Adanya penolakan dari masyarakat untuk pemanfaatan hutan menjadi HTI dan HTR hal ini dikarenakan belum mengertinya masyarakat terhadap manfaat HTI dan HTR;

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap konsep pembangunan hutan HTI dan HTR;

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap konsep pembangunan hutan HTI dan HTR;
2. Melaksanakan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hutan untuk HTI dan HTR.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2016, Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pameran / expo produk hasil hutan bukan kayu;

2. Mendorong dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pemasaran produk hasil hutan bukan kayu;
3. Memberikan pelatihan tata cara kemasan yang menarik dari produk hasil hutan bukan kayu.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2016, capaian sasaran-8 sesuai dari target yang telah ditetapkan.

h. Sasaran-9 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|---|-------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Meningkatnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan | Meningkatnya pengelolaan PNPB | 5% | 5% | 100 | 100 |
| Rata – rata capaian sasaran-9 | | | | 100 % | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

J. Sasaran-10 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-10, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Prosentase (%) | % capaian tahun sebelumnya |
|---|--|--|--|----------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Terbangunnya hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta peningkatan usaha kehutanan | Bertambahnya luas hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta tumbuh dan berkembangnya perekonomian | 1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan | 1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan | 100 | 100 |
| Rata – rata capaian sasaran-10 | | | | | 100 % |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-10, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara singkat sasaran di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

- A. **Sasaran-1** yaitu tersedianya data dan informasi potensi sumber daya hutan lingkup Provinsi, dengan dilakukan pengumpulan data statistik kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B. **Sasaran-2** yaitu terselenggaranya penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan menetapkan rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan (KH) terlayani 100% secara tepat waktu, dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penggunaan kawasan hutan (KH) dengan data dan informasi penggunaan kawasan hutan (KH);
- C. **Sasaran-3** yaitu terselenggaranya upaya – upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal serta terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan, diadakannya Patroli rutin, pulbaket dan penindakan terhadap 15% tipihut yang ditemukan, peningkatan upaya preventif di 6 Kabupaten/Kota, akan tercapai tujuan secara optimal yaitu: menurunnya tindak pidana kehutanan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan;
- D. **Sasaran-5** yaitu terkumpulnya data potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang potensial dikembangkan untuk mendukung pariwisata sektor kehutanan dan terjalinnya kerjasama usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan, terhimpunnya Database flora fauna dan habitatnya serta peningkatan kegiatan konservasi, jasa lingkungan dan wisata alam dengan melakukaam proses penyusunan database flora, fauna tertentu dan habitatnya di 6 Kabupaten, mendorong kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di 7 kabupaten/Kota;
- E. **Sasaran-6** yaitu optimalnya pendapatan negara bukan pajak dan terciptanya tertib administrasi peredaran hasil hutan melalui pengumpulan data potensi dan pilihan pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu, dengan tertibnya administrasi

peredaran dan iuran hasil hutan dan peningkatan iuran Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 341,5 %;

- F. **Sasaran-7** yaitu terlaksananya pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dengan terbentuknya 1 hutan adat, 1 hutan rakyat, dan 1 kelompok tani hutan;

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun anggaran 2016, yaitu :

a. Target Pendapatan

Pada tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 11.751.545.550,-, namun sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik yang dapat dicapai sebesar 96,815 dengan realisasi anggaran/keuangan yang dicapai adalah 93,00%.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 11.751.545.550,-, namun sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik yang dapat dicapai sebesar 96,815 dengan realisasi anggaran/keuangan yang dicapai adalah 93,00%.

Anggaran sejumlah Rp. 11.751.545.550,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp. 6.210.253.000 dan belanja langsung sebanyak Rp. 14.212.710.750,-.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diupayakan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kegiatan dan Pengukuran Kinerja.

Dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tahun 2016. Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan indikator capaian kinerja secara totalitas, namun setidaknya masyarakat dan *stakeholder* dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang,

Sekian dan terima kasih.

Pangkalpinang, Februari 2016

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Nazalyus, M. Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19590824 198603 1 009

